
PEMBUATAN PETA BATAS RT/RW SECARA PARTISIPATIF UNTUK MENDUKUNG PERENCANAAN WILAYAH DI KELURAHAN BULURI KOTA PALU

PARTICIPATORY CREATION OF RT/RW BOUNDARY MAPS TO SUPPORT REGIONAL PLANNING IN BULURI VILLAGE, PALU CITY

Alamsyah¹, Riri Anggriani², Suryani Solu³, Hardianti⁴, Nurhidayah⁵

^{1,3} Jurusan Teknik Elektro/Fakultas Teknik, Universitas Tadulako, Palu

² Jurusan Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu

^{4,5} Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial/FKIP, Universitas Tadulako, Palu

E-mail correspondence: alamsyah.zakaria74@gmail.com ¹

Article History:

Received: 30.07.2025

Revised: 10.09.2025

Accepted: 14.09.2025

Abstrak: Peta administrasi wilayah merupakan instrumen strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis spasial. Di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, belum tersedianya peta batas RT/RW yang akurat mengakibatkan distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran, tumpang tindih wilayah kerja, serta potensi konflik sosial antarwarga. Kegiatan pengabdian ini bertujuan menyusun peta administrasi RT/RW secara partisipatif dengan melibatkan warga, aparat kelurahan, serta ketua RT/RW. Metode yang digunakan adalah Participatory Mapping, dengan pemanfaatan data spasial resmi (Shapefile) yang diolah menggunakan perangkat lunak ArcGIS. Tahapan kegiatan meliputi koordinasi, sosialisasi, pelatihan teknis, pengumpulan data, validasi lapangan, dan penyusunan peta akhir. Hasil kegiatan berupa dokumen peta digital dan cetak yang akurat secara teknis dan diterima secara sosial. Peta ini menjadi acuan resmi dalam perencanaan pembangunan, pemetaan kependudukan, dan pelayanan publik. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan literasi spasial masyarakat serta memperkuat legitimasi batas wilayah. Pemetaan partisipatif terbukti efektif dalam menghasilkan peta yang inklusif, legal, dan adaptif terhadap kebutuhan wilayah perkotaan.

Kata Kunci: Pemetaan Partisipatif, Peta Administrasi RT/RW, Data Spasial, ArcGIS, Kelurahan Buluri

Abstract: Regional administrative maps are a strategic instrument in spatial-based governance and public services. In Buluri Village, Ulujadi District, Palu City, the lack of accurate neighborhood unit (RT/RW) boundary maps has resulted in inaccurate aid distribution, overlapping work areas, and potential social conflicts among residents. This community service activity aims to compile RT/RW administrative maps in a participatory manner, involving residents, village officials, and RT/RW heads. The method used is Participatory Mapping, utilizing official spatial data (Shapefile) processed using ArcGIS software. The activity stages include coordination, outreach, technical training, data collection, field validation, and final map preparation. The results of the activity are digital and printed map documents that are technically accurate and socially accepted. These maps serve as official references in development planning, population mapping, and the provision of public services. Additionally, this activity enhances community spatial literacy and reinforces the legitimacy of regional boundaries. Participatory mapping has proven effective in producing

maps that are inclusive, legal, and adaptive to the needs of urban areas.

Keywords: *Participatory Mapping, RT/RW Administrative Maps, Spatial Data, ArcGIS, Buluri Village*

PENDAHULUAN

Peta merupakan salah satu instrumen penting (Mrabawani Insan Rendra et al., 2024) dalam pengambilan keputusan berbasis wilayah (Agung Wicaksono, 2022). Sayangnya, banyak desa/kelurahan yang belum memiliki peta administrasi yang sesuai dengan kondisi aktual di lapangan (Safri Yanti Rahayu and Atika Sari, 2025) ketersediaan data dan informasi peta kelurahan sangat terbatas (Ferry Sobatnui et al., 2022), dan belum memanfaatkan teknologi pemetaan terkini seperti citra satelit resolusi tinggi. Peta berfungsi untuk penataan wilayah yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan pembangunan di kawasan kelurahan (Oktavianto Gustin et al., 2024), menyampaikan informasi spasial yang dapat digunakan dalam perencanaan, dan pengambilan keputusan. Dalam konteks desa, peta menjadi alat penting untuk mengetahui struktur wilayah, batas-batas administrasi, serta potensi sumber daya yang dimiliki. Peta administrasi merupakan peta yang menampilkan batas wilayah pemerintahan, seperti batas provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa dan dusun. Peta ini digunakan untuk mengetahui cakupan wilayah administrative, pengelolaan wilayah oleh pemerintah desa, mendukung penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan.

Peta batas wilayah administrasi RT/RW memiliki peranan penting dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan. Keberadaan peta ini memungkinkan identifikasi dan penataan ruang wilayah secara lebih tepat, terutama dalam mendukung program pembangunan, dan pelayanan sosial (Agus Purnomo et al., 2023). Di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, kebutuhan akan peta batas administratif semakin mendesak seiring pertumbuhan penduduk dan pembangunan kawasan (BPS Kota Palu, 2023).

Perkembangan tata ruang perkotaan yang cepat sering kali tidak diikuti oleh pembaruan dokumen administrasi wilayah, terutama pada tingkat mikro seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Hal ini menjadi persoalan umum di banyak daerah, termasuk Kelurahan Buluri yang berada di Kecamatan Ulujadi, Kota Palu. Ketidakteraturan dalam penetapan dan dokumentasi batas RT/RW menimbulkan berbagai kendala, mulai dari tumpang tindih wilayah kerja pemerintahan, ketidaktepatan sasaran bantuan sosial, hingga potensi konflik batas antarwarga (Amiany et al., 2023). Selain itu, belum tersedianya dokumen spasial resmi yang menetapkan batas RT/RW secara jelas dan terstandardisasi. Oleh karena itu, kegiatan

pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyusun peta administrasi RT/RW secara partisipatif, melibatkan masyarakat, perangkat RT/RW, dan pemerintah kelurahan.

Pemetaan partisipatif (*participatory mapping*) menjadi pendekatan yang relevan untuk mengatasi persoalan pemetaan batas desa/kelurahan (Idham Nugraha et al., 2022). Melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam proses identifikasi, penandaan, dan verifikasi batas wilayah, pemetaan partisipatif tidak hanya menghasilkan peta yang akurat secara teknis, tetapi memiliki legitimasi sosial yang kuat (Iskandar Zulkarnain, 2022). Pendekatan ini telah terbukti efektif di berbagai wilayah dalam membangun kesepahaman, mengurangi konflik batas, serta meningkatkan kapasitas lokal dalam pemanfaatan informasi geospasial.

Kelurahan Buluri merupakan salah satu kawasan yang sedang berkembang dengan pesat di wilayah barat Kota Palu. Dinamika pemukiman dan pertumbuhan penduduk yang meningkat menuntut adanya kejelasan batas administrasi di tingkat RT/RW agar pembangunan wilayah dapat terarah dan tepat sasaran. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menyusun peta administrasi RT/RW secara partisipatif, dengan melibatkan warga, aparat kelurahan, dan ketua RT/RW setempat. Melalui proses ini, diharapkan diperoleh peta yang tidak hanya sah secara spasial, tetapi juga diterima oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai acuan perencanaan dan pelayanan wilayah. Wilayah administratif tingkat lokal seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta perencanaan pembangunan yang berbasis wilayah. Sayangnya, di banyak wilayah termasuk Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, batas-batas administratif RT/RW belum memiliki representasi spasial yang akurat dan legal. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian wilayah kerja pemerintahan, kesulitan distribusi bantuan sosial, hingga potensi konflik antarwarga.

Permasalahan batas wilayah tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial, kultural, dan politis. Pendekatan top-down dalam menetapkan batas seringkali mengabaikan pengetahuan lokal, sehingga menghasilkan peta yang tidak diterima secara sosial oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, pendekatan **pemetaan partisipatif** (*participatory mapping*) muncul sebagai solusi inovatif yang menekankan keterlibatan aktif warga dalam proses identifikasi, verifikasi, dan penggambaran batas wilayah mereka sendiri (Anang Wahyu Sejati et al., 2023). Pemetaan partisipatif tidak hanya menguatkan aspek teknis spasial melalui pemanfaatan teknologi geospasial seperti GPS dan GIS, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dari hasil pemetaan. Pengetahuan lokal yang selama ini tidak terdokumentasi dapat terintegrasi secara formal dalam peta administratif, sehingga lebih sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Selain itu, partisipasi warga dapat mendorong rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pemetaan, sekaligus menjadi wahana edukasi spasial bagi masyarakat.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam setiap tahapan. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa peta batas RT/RW di Kelurahan Buluri yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Pembuatan peta batas wilayah administratif RT/RW di Kelurahan Buluri dilakukan dengan memanfaatkan data Shapefile (SHP) yang telah tersedia sebagai sumber utama informasi spasial. Data ini kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) menggunakan aplikasi ArcGIS, guna menghasilkan visualisasi batas wilayah yang akurat dan terstandarisasi. Proses pengolahan meliputi impor data SHP ke dalam platform ArcGIS, perbaikan geometri dan atribut, serta penyusunan simbolisasi peta berdasarkan kategori RT dan RW. Untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi di lapangan, dilakukan validasi melalui survei partisipatif bersama warga dan aparat kelurahan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

A. Koordinasi Awal dan Identifikasi Wilayah

Kegiatan diawali dengan koordinasi bersama pihak Kelurahan Buluri guna menyampaikan tujuan dan manfaat kegiatan, penentuan kebutuhan ruang lingkup wilayah pemetaan, identifikasi awal terhadap jumlah RT/RW, kondisi sosial dan geografis wilayah yang akan dipetakan, serta memperoleh dukungan administratif.



Gambar 1 Kordinasi Awal Bersama Pihak Kelurahan

B. Sosialisasi

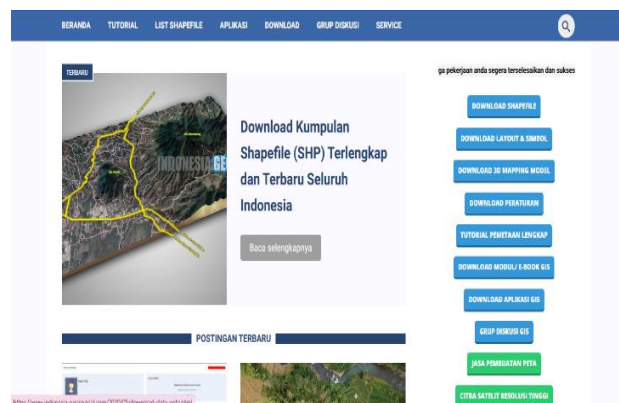
Tim pengabdian melaksanakan sosialisasi kepada aparat kelurahan, ketua RT/RW dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya peta administrasi serta konsep pemetaan partisipatif. Kegiatan ini dilanjutkan dengan pelatihan teknis pengumpulan data lapangan dengan melakukan survei sederhana dan aplikasi pemetaan Arcgis. Pada kegiatan ini, diawali pertemuan awal dengan ketua RT/RW dan masyarakat guna membangun komitmen bersama, penyampaian materi terkait pentingnya peta batas wilayah bagi perencanaan pembangunan dan pengelolaan data kependudukan, serta penyusunan jadwal pelaksanaan pemetaan yang disepakati bersama.



Gambar 2 Sosialisasi Pembuatan Peta Administrasi

C. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data diawali dengan mengumpulkan data sekunder yang meliputi peta dasar dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), data administrasi kelurahan, serta citra satelit yang relevan. Selain itu, pengumpulan data dilakukan dengan mendownload shapfile batas administrasi wilayah kelurahan RT/RW di Inageospasial.



Gambar 3 Data Peta Administrasi Wilayah RT/RW

D. Pengolahan dan Digitalisasi Peta

Data spasial yang diperoleh kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG) Menggunakan Arcgis. Tim melakukan digitalisasi batas-batas RT/RW serta penyusunan peta administrasi yang sesuai dengan kaidah kartografis, termasuk penambahan elemen-elemen peta seperti legenda, skala, dan orientasi. Digitasi batas wilayah berdasarkan titik koordinat yang telah diperoleh. Selain itu, penyusunan peta tematik RT/RW dengan menambahkan informasi penunjang (jalan, fasilitas umum, batas kelurahan).



Gambar 4 Batas Wilayah RT/RW Mdenggunakan ArcGIS

E. Validasi dan Finalisasi Peta

Peta hasil digitalisasi didiskusikan kembali dengan pihak kelurahan dan warga untuk mendapatkan masukan dan validasi. Koreksi dilakukan jika ditemukan ketidaksesuaian antara peta dan kondisi di lapangan. Setelah disepakati, peta disimpan dalam format digital dan dicetak sebagai dokumen resmi peta administrasi Kelurahan Buluri.



Gambar 5 Kordinasi Pengecekan Peta Melalui Kelurahan

F. Dokumentasi dan Pelaporan



Gambar 6 Laporan dan Dokumentasi Peta Administrasi Batas RT/RW

Seluruh proses kegiatan didokumentasikan dalam bentuk laporan tertulis, dokumentasi foto, serta peta cetak dan digital. Hasil akhir diserahkan kepada pihak kelurahan sebagai referensi resmi penetapan batas RT/RW dan dasar untuk perencanaan pembangunan wilayah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemetaan Partisipatif

Pemetaan partisipatif merupakan pendekatan yang memadukan teknologi pemetaan modern dengan pendekatan partisipatif. Pendekatan ini mampu menggali pengetahuan keruangan (spatial) dari masyarakat setempat karena masyarakat setempat pada dasarnya adalah ahli yang memiliki pengetahuan lingkungan tempat tinggalnya. Peta yang dihasilkan oleh masyarakat setempat menggambarkan tempat mereka tinggal, memperlihatkan tempat-tempat yang oleh masyarakat dianggap penting seperti misalnya batas wilayah tertentu, pengelolaan sumber daya alam tradisional, daerah sakral, dan sederet tempat penting lainnya (Hirsan et al., 2022).

Pemetaan partisipatif juga berperan penting dalam meningkatkan literasi spasial masyarakat dan membangun transparansi dalam pengambilan keputusan berbasis wilayah. Warga yang semula pasif terhadap urusan tata ruang menjadi lebih paham dan peduli terhadap kondisi lingkungannya. Hal ini selaras dengan keterlibatan warga dalam pemetaan wilayah dengan memperkuat kohesi sosial dan mempercepat penyelesaian konflik batas internal.

B. Hasil Pemetaan Batas RT/RW

Batas Wilayah Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Kelurahan Buluri merupakan salah satu dari enam kelurahan yang berada di wilayah administratif Kecamatan

Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis, Kelurahan Buluri memiliki letak strategis di bagian barat daya Kota Palu dengan karakteristik topografi yang sebagian besar terdiri atas kawasan perbukitan serta area pesisir. Adapun batas-batas administratif wilayah Kelurahan Buluri adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara: Berbatasan langsung dengan Kelurahan Tipu dan Kelurahan Donggala Kodi. Wilayah ini didominasi oleh pemukiman dan lahan pertanian masyarakat, serta jalur penghubung utama antar kelurahan.

Sebelah Selatan: Berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Donggala. Pada bagian ini, wilayah didominasi oleh perbukitan dan areal perkebunan milik masyarakat lokal.

Sebelah Barat: Langsung berbatasan dengan Laut Teluk Palu, menjadikan wilayah ini memiliki potensi kelautan dan perikanan tangkap serta menjadi akses ekonomi masyarakat pesisir.

Sebelah Timur: Berbatasan dengan Kelurahan Watusampu dan sebagian wilayah hutan lindung. Bagian timur ini menjadi daerah tangkapan air dan memiliki fungsi ekologis yang cukup penting.

Melalui survei lapangan dan pemetaan partisipatif, diperoleh data spasial berupa titik-titik koordinat batas RT/RW yang kemudian diolah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil akhir berupa peta batas administrasi RT/RW Kelurahan Buluri dengan format digital (.shp dan .pdf) dan cetak. Berdasarkan hasil pemetaan data yang diperoleh adalah jumlah RT sebanyak 15 dan jumlah RW sebanyak 6. Batas wilayah ditandai menggunakan penanda fisik yang ada di lapangan, seperti jalan, sungai kecil, lahan kosong, pagar pemukiman, serta patok yang disepakati bersama. Peta yang dihasilkan dilengkapi dengan informasi tambahan seperti lokasi fasilitas umum, jaringan jalan, dan topografi dasar, sehingga dapat mendukung proses perencanaan pembangunan di Kelurahan. Keberhasilan pemetaan ini tidak hanya menghasilkan produk berupa peta, tetapi juga dokumentasi digital yang dapat diperbarui sewaktu-waktu jika terjadi perubahan batas yang telah diserahkan kepada Bu Lurah sebagai pimpinan Kelurahan Buluri dalam bentuk software.

Batas wilayah merupakan tanda pemisah antara wilayah geografis yang bersebelahan. Unit geografi tersebut bisa dalam aspek fisik, aspek politik, aspek sosio-kultural, dan aspek ekonomi. Penetapan batas wilayah tersebut telah melalui proses verifikasi administratif dan pemetaan partisipatif bersama pihak kelurahan, RT/RW, dan tokoh masyarakat setempat. Batas-batas ini tidak hanya penting dalam aspek tata kelola pemerintahan, tetapi juga menjadi

dasar dalam pelaksanaan program pembangunan, penataan ruang, serta kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis potensi dan kebutuhan local (Syafitri et al., 2017).

C. Pembuatan Peta Administrasi dan Validasi

Pembuatan peta administrasi desa/ kelurahan menggunakan cara pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif pada prinsipnya sama dengan pemetaan pada umumnya, perbedaannya adalah pelaksanaan dari pemetaan partisipatif ini menempatkan suatu komunitas masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayah desa/kelurahan tersebut. Teknik pemetaan partisipatif ini sangat efisien untuk memetakan batas desa/kelurahan, dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat berupa diskusi kecil dalam kelompok dengan informan kunci yang mengetahui batas-batas desa/kelurahan. Peran anggota masyarakat dalam menggambarkan batas-batas desa/kelurahan sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan dan kesepakatan batas administrasi desa/kelurahan.

Peta administrasi kelurahan merupakan instrumen penting dalam pengelolaan wilayah desa, yang berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan batas-batas administratif serta berbagai fitur geografis dan infrastruktur penting di dalamnya. Peta administrasi desa/kelurahan tidak hanya memudahkan dalam perencanaan pembangunan, tetapi juga penting dalam berbagai aspek lain seperti pengelolaan sumber daya alam, pelaksanaan program-program pemerintah, dan pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat lokal (Syamsul Razak Haraty et al., 2024).

Peta administrasi adalah jenis peta tematik yang secara khusus menggambarkan batas-batas wilayah administratif suatu daerah, mulai dari tingkat Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, hingga RW/RT yang mana salah satu manfaat peta administrasi adalah menyajikan nama-nama wilayah administrasi untuk identifikasi. Peta administrasi pada dasarnya merupakan suatu data teknis dalam suatu kelurahan/desa yang penting dan di perlukan untuk mengetahui letak dan batas suatu wilayah secara geografis sehingga mempermudah dalam mendapatkan informasi mengenai suatu daerah (Husain et al., 2023).

Untuk tahapan validasi peta dilakukan melalui forum diskusi kelurahan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan. Pada forum ini ditemukan beberapa perbedaan persepsi mengenai batas antara dua RT yang berbatasan. Melalui musyawarah yang difasilitasi tim pelaksana, perbedaan tersebut dapat diselesaikan secara mufakat dengan mengacu pada kesepakatan warga dan penanda fisik yang paling mudah diidentifikasi.

Proses validasi ini memperlihatkan bahwa pendekatan partisipatif dan forum diskusi kelurahan mampu mengurangi potensi konflik batas wilayah karena keputusan diambil bersama berdasarkan data lapangan yang terbuka.

D. RT/RW

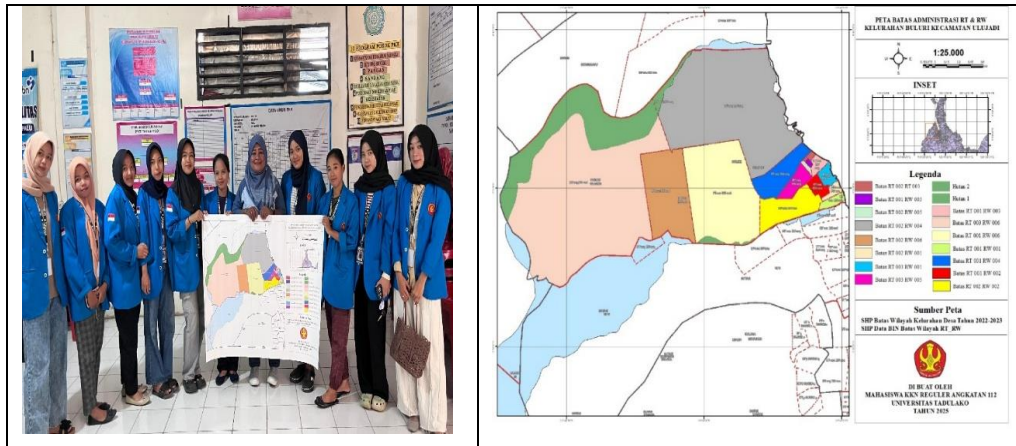
Rukun Warga (RW) adalah istilah pembagian wilayah dibawah kelurahan. Rukun Warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) diwilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Lurah. Rukun Warga (RW) adalah organisasi masyarakat yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan desa/kelurahan, yang membawahi beberapa Rukun Tetangga (RT). RW berfungsi sebagai jembatan antara warga dan pemerintah, serta mengkoordinasikan kegiatan di tingkat wilayahnya. Rukun Warga berfungsi sebagai bagian dari sistem pemerintahan kelurahan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah setempat. RW bekerja sama dengan RT untuk melaksanakan program bersama seperti pembangunan infrastruktur publik, menjaga keamanan lingkungan, serta mengadakan kegiatan sosial (Azahra and Rauf, 2025).

Rukun Tetangga adalah sebuah lembaga masyarakat yang birokrasinya berada dibawah Rukun Warga yang dapat membantu warga dalam meningkatkan kelancaran tugas pemerintah daerah, dan pembangunan di desa. Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warga setempat. Dalam hal ini Rukun Tetangga merupakan organisasi masyarakat yang dibina oleh pemerintah untuk memelihara kehidupan masyarakat berdasarkan gotongroyong dan kekeluargaan serta membantu kelancaran tugas. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan (Novita dan Juliasari, 2015).

Kelurahan Buluri merupakan salah satu dari enam kelurahan di Kecamatan Ulujadi yang telah melaksanakan program pembuatan peta administrasi RT/RW. Program ini bertujuan untuk menggambarkan batas wilayah masing-masing RW secara terpisah dalam satu peta khusus. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa batas-batas wilayah RW kini lebih jelas, terstruktur, dan terdokumentasi secara visual.

Adanya peta administrasi tersebut, masyarakat dan perangkat kelurahan menjadi lebih mudah dalam mengenali batas wilayah, melakukan pendataan, serta mengelola pembangunan secara adil dan merata. Peta ini juga membantu mencegah terjadinya konflik batas wilayah. Selain itu, peta ini menjadi langkah awal untuk menuju digitalisasi data wilayah melalui sistem informasi geografis (SIG) di masa depan Peta ini disusun berdasarkan data spasial resmi yang telah diolah menggunakan aplikasi ArcGIS, dengan penyesuaian terhadap kondisi faktual di lapangan. Setiap peta telah dilengkapi dengan informasi batas wilayah, jaringan jalan, dan keterangan yang memudahkan pengguna dalam memahami informasi

spasial yang disajikan. Penyusunan peta ini bertujuan memberikan kejelasan administrasi bagi masyarakat maupun pemerintah kelurahan, khususnya dalam hal pengelolaan wilayah, perencanaan pembangunan, dan pelayanan publik.



Gambar 7 Hasil Akhir Peta dan Penyerahan Peta Langsung Kepada Ibu Lurah

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada pembuatan peta batas RT/RW secara partisipatif di Kelurahan Buluri, Kota Palu telah berhasil dilaksanakan dengan melibatkan perangkat kelurahan, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan warga secara aktif pada setiap tahapan kegiatan. Melalui pendekatan partisipatif, diperoleh beberapa kesimpulan penting sebagai berikut:

1. Terciptanya peta batas administrasi RT/RW yang akurat dan terverifikasi yang dihasilkan dengan memuat batas 6 RW dan 15 RT di Kelurahan Buluri lengkap dengan titik koordinat, penanda fisik, serta informasi pendukung seperti jaringan jalan dan fasilitas umum.
2. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi kunci keberhasilan melalui keterlibatan aktif warga dalam survei lapangan, musyawarah, dan forum diskusi kelurahan.
3. Pendekatan partisipatif efektif dalam menyelesaikan perbedaan persepsi batas wilayah melalui diskusi terbuka dan kesepakatan bersama, perbedaan penafsiran batas yang terjadi antar-RT/RW dapat diselesaikan secara damai dan mufakat dengan mengacu pada penanda fisik yang jelas di lapangan.
4. Peta yang dihasilkan bermanfaat langsung untuk mendukung perencanaan wilayah dan administrasi kependudukan.
5. Adanya dokumen digital meningkatkan keberlanjutan data, dimana format digital peta memungkinkan pemutakhiran data secara berkala tanpa harus memulai pemetaan ulang, sehingga mendukung pengelolaan wilayah yang adaptif terhadap perkembangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kelurahan Buluri, Kota Palu, khususnya kepada Lurah dan seluruh jajaran perangkat kelurahan yang telah memberikan dukungan penuh serta memfasilitasi kegiatan ini sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan seluruh warga Kelurahan Buluri yang telah berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, survei lapangan, musyawarah, hingga validasi peta. Partisipasi yang diberikan menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan peta batas wilayah yang akurat dan disepakati bersama. Selanjutnya, apresiasi kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako yang telah memfasilitasi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan Mahasiswa KKN Angkatan 112 yang berposko di Kelurahan Buluri sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Akhir kata, kami berharap hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan tata kelola wilayah dan mendukung perencanaan pembangunan di Kelurahan Buluri, Kota Palu secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wicaksono. (2022). The Participatory Mapping as Soft-Territorialization Discipline Practice of The Karen People in The Thailand Highlands. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 8(1), 1-18.
- Agus Purnomo, Idris, and Bayu Kurniawan. (2023). Inventarisasi Data Keruangan melalui Pemetaan Partisipatif Batas Desa Langlang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(2), 217-224.
- Amiany, Desi Riani, & Fredyantoni F. Adji. (2023). Pemetaan Tata Ruang Desa Berbasis Partisipatif dalam Upaya Penyelesaian Konflik, Pemanfaatan dan Perlindungan Ruang Masyarakat di Desa Talekung Punei Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas. *Diteksi : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Teknik*, 1(1), 29–39.
- Anang Wahyu Sejati, M. Indra Hadi Wijaya, Mitha Asyita Rahmawaty, Imam Buchori, Yudi Basuki, Hadi Wahyono, Ahmad Jihan Muzaki, Hendra Tata Pradipta, and I Gusti Wiratmaja. (2023). Reducing Rural Boundary Conflict through Participatory Mapping and GNSS-GIS. *Geospatial Science for Smart Land Management*, CRC Press.
- Azahra, Y., & Rauf, R. (2025). Peranan Rukun Warga Membantu Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Antar Warga di Kelurahan Kedungsari Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(2), 335-339.
- Ferry Sobatnui, Faris Ade Irawan, Henyningtyas Suhel, and Yastin David Batara. (2022). Pemetaan Administratif Batas Rt 05 Rw 03 Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang. *Jurnal Impact : Implementation and Action*, 4(2), 100-108.

- Hirsan, F. P., Kurniawan, A., Ridha, R., & Yuniarman, A. (2022). Pemetaan Delineasi Kawasan Perkotaan Berbasis Partisipatif. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 6–9.
- Husain, F., Nadhilah, A., Anshari, Q., Hasanuddin, U., Malino, J. P., Gowa, K., Selatan, S., Kelautan, T., & Teknik, F. (2023). Pengadaan Peta Administrasi Desa Patallasang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Hasanuddin*, 4(2), 92–99.
- Idham Nugraha, Mardianto Manan, Puji Astuti, and Arie Apriadi. (2022). The Application of Participatory Mapping to Support Boundary. *Journal of Urban Regional Planning and Sustainable Environment*, 1(1), 1-8.
- Iskandar Zulkarnain. (2022). Community Empowerment Through Participatory Mapping For Identification And Mapping Of Customary Areas Of The Lom Tribe In Belinyu Sub-District, Bangka District. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung*, 1(1), 9–17.
- Mrabawani Insan Rendra, Muhammad Miftakhul Huda, Rio Ary Sandy, Salma Roisewajid, Ricki Yoga Saputra, and Ahmad Niamul Abrori. (2024). Penyusunan Peta Administrasi Desa dengan Pemetaan Partisipatif untuk Mendukung Perencanaan dan Pembangunan Desa Semambung Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Abdimas Galuh*, 6 (1), 847-856.
- Novita, I., & Juliasari, N. (2015). Analisa dan perancangan sistem informasi administrasi rt pada kelurahan pondok pucung. *Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Administrasi Rt Pada Kelurahan Pondok Pucung, 2087–0930(ICT-592)*, 28.
- Oktavianto Gustin, Arif Roziqin, Farouki Dinda Rassarandi, Andy Triwinarko, Sudra Irawan, Luthfiya Ratna Sari, Siti Noor Chayati, Rizki Widi Pratama, Muhammad Ghazali, Muhammad Haiqal, and Melia Wandanita. (2024). Penetapan Batas Wilayah RT & RW di Kelurahan Sembulang melalui Pemetaan Partisipatif. *Abdimas-Polibatam*, 6(2), 47-60.
- Safri Yanti Rahayu and Atika Sari. (2025). Penerapan Metode Kartometrik untuk Pemetaan Batas Wilayah Desa di Daerah Terpencil: Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Ampa Kolak. *Mitra Teras: Jurnal Terapan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 13-22.
- Syafitri, A. kartika N., Awaluddin, M., & A., F. J. (2017). Analisis Pengaruh Pemilihan Peta Dasar Terhadap Penentuan Batas Pengelolaan Wilayah Laut Secara Kartometris (Studi Kasus : Kabupaten Sumenep, Jawa Timur). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(3), 127–136.
- Syamsul Razak Haraty, La Hamimu, Bahdad, Laode Ihksan Juarzan, Uswardin, Fitriani, Alfirman, & Indrawati. (2024). Pembuatan Peta Administrasi Desa Amesiu untuk Penguatan Tata Kelola Wilayah dan Perencanaan Berbasis Geografis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JAPIMAS)*, 3(2), 62–68.